

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DI KOTA PEKANBARU

Henni Indrayani

Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru

E-mail: Henni.indrayani@uin-suska.ac.id

Harkaneri

Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru

E-mail: harkaneri@uin-suska.ac.id

Abstrak

Salah satu lokasi pedagang kaki lima yang ada di kota Pekanbaru adalah PKL yang ada di sepanjang jalan H.R. Subrantas kecamatan Tampan Panam kota Pekanbaru. Banyaknya pedagang kaki lima yang beraktivitas di sepanjang jalan H.R. Subrantas menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban, kenyamanan dan kebersihan serta keindahan kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) karakteristik PKL di kota Pekanbaru, 2) faktor-faktor penghambat pengembangan PKL, 3) dampak positif dan negatif keberadaan PKL, 4) kebijakan pemerintah kota terhadap PKL di kota Pekanbaru dan 5) pengembangan dan pemberdayaan PKL di kota Pekanbaru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara langsung kepada pelaku PKL, konsumen yang berbelanja kepada para PKL dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian ini di peroleh identifikasi karakteristik dari variabel personal, variabel historis, variabel aktivitas, variabel kepemilikan, variabel komunitas, respon pemerintah kota terhadap PKL dan variabel bantuan terhadap PKL dan karakteristik konsumen yang berbelanja kepada PKL disebabkan oleh harga yang murah, mudah ditemukan pada setiap lokasi di jalur utama lingkungan perkotaan. Faktor-faktor penghambat pengembangan PKL adalah pemerintah kota belum memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan lokasi PKL, dinas-dinas di lingkungan pemerintah kota belum berfungsi dan bertugas dengan baik, kesadaran pelaku PKL yang masih rendah terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, pemahaman yang rendah terhadap perilaku konsumen, premanisme, permodalan, tempat usaha dan fasilitas pendukung serta perlindungan usaha dari pemerintah kota.

Kata kunci : karakteristik, pedagang kaki lima

PENDAHULUAN

Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Di negara sedang berkembang, sekitar

30%-70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Namun sektor informal menjadi semakin rumit di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya

dikarenakan sektor formal tidak mendukung keberadaan sektor informal.

Pada umumnya, keberadaan sektor informal tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber kehidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.

Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota besar di wilayah propinsi Riau yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa dalam melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Saat ini kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat, hal ini dapat dibuktikan melalui pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan. Perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa di sektor formal maupun pada sektor non formal menunjukkan kota Pekanbaru sedang mengalami proses pembangunan di berbagai sektor baik ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan sebagainya.

Sebagai ibukota provinsi Riau, kota Pekanbaru merupakan simpul pembangunan. Pembangunan pada sektor perdagangan dan jasa menunjukkan angka yang mendominasi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Keterbatasan lapangan pekerjaan pada bidang sektor formal mengakibatkan kegiatan-kegiatan pada sektor informal terus meningkat.

Sektor informal di bidang ekonomi yang muncul dan menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Fenomena Pedagang Kaki Lima melanda hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Meningkatnya pedagang kaki lima disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga, sementara peluang mendapatkan pekerjaan disektor formal sangat sulit, maka sektor informal menjadi pilihan. Fenomena pedagang kaki lima di kota pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan pendataan dinas pasar kota Pekanbaru (www.spiritriau.com, Maret 2014) pedagang kaki lima (PKL) di kota Pekanbaru sebanyak 11.835 pedagang.

Salah satu lokasi pedagang kaki lima yang ada di kota Pekanbaru adalah Pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan H.R. Subrantas kecamatan Tampan Panam. Banyaknya pedagang kaki lima yang beraktivitas di sepanjang jalan H.R Subrantas menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu ketertiban, kenyamanan dan kebersihan serta keindahan kota. Meningkatnya Pedagang Kaki Lima tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan sektor informal ini berkembang dengan sendiri secara spontan. Dan akhirnya pedagang kaki lima tumbuh dengan memanfaatkan ruang-ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, drainase dan emperan toko dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan bagi kota karena pada umumnya aktivitas pedagang kaki lima kurang memperhatikan ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) atau kepentingan umum pada

tempat yang ditempatinya, yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana karakteristik pedagang kaki lima di kota Pekanbaru? 2) Apa saja dampak positif dan negatif dari keberadaan pedagang kaki lima di kota Pekanbaru? 3) Bagaimana kebijakan pemerintah kota terhadap pedagang kaki lima di kota Pekanbaru? 4) Apa saja faktor-faktor penghambat pengembangan pedagang kaki lima di kota Pekanbaru? 5) Bagaimana pengembangan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di kota Pekanbaru?

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan hasanah pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam upaya memberdayakan sektor informal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Karakteristik Sektor Informal

Dalam kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral (2009), keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan Nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangan mampu

berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi pencari kerja.

Ketidakmampuan pembangunan menyediakan peluang kerja di sektor formal, untuk sementara dapat di redam karena tersedianya peluang kerja di sektor formal. Sektor informal meskipun tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara dapat berperan sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendorong kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan perekonomian nasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional. Peran sektor informal ini berlangsung sejak lama dalam pasang surut pengembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi.

Definisi sektor informal yang digunakan oleh ILO saat melaksanakan misinya di Kenya tahun 1913, informalitas dirumuskan sebagai cara bekerja yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti mudah dimasuki, pemakaian sumber-sumber daya lokal, pemilikan oleh keluarga, berskala kecil, padat karya dan pemakaian teknologi yang disederhanakan, ketrampilan yang diperoleh di luar sistem pendidikan formal serta bergerak di pasar yang kompetitif dan tidak berada dibawah pengaturan resmi.

Dalam laporan ILO tersebut dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di Indonesia menurut Hidayat (1978) telah menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai berikut yaitu:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik karena timbulnya unit usaha yang

tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor formal.

2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke subsektor lainnya.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga kecil.
8. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enter prises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
9. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi

Sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah.

Sebagai bagian dari sistem perekonomian Indonesia, keberadaan sektor informal memiliki daya serap terhadap tenaga kerja yang cukup besar dan berperan sebagai sektor penyangga (*buffer zone*) yang sangat lentur dan terbuka, juga memiliki kaitan erat dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah dan yang potensial bahkan menjadi ujung tombak

pemasaran yang potensial (Bagong Suyanto dan Karnaji, 2005).

Pengembangan dan pemberdayaan Sektor Informal

Ekonomi informal sebagai penyangga distosistem ekonomi nasional harus diselesaikan dengan politik dan kebijakan ekonomi yang tepat, yaitu (Rachbini, 2010):

1. Aspek kebijakan normatif legal. Undang-undang yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus ramah terhadap sektor informal dan menegaskan bahwa sektor ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi. Eksistensinya secara eksplisit diakui, sehingga bisa disentuh oleh program pembangunan. Sektor ini sesungguhnya merupakan bagian dari ekonomi rakyat dan karenanya secara normatif-legal harus ada arahan aksi kebijakan afirmatif.
2. Aspek kebijakan peranan. Peranan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat diperlukan, termasuk Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan menteri sektoral lainnya. Kerja kolektif untuk memajukan sektornya masing masing merupakan kebijakan yang baik untuk mengembangkan sektor formal dan menyusutkan jumlah sektor informal.
3. Mobilisasi sumber daya, baik manajemen, keahlian, maupun keuangan. Kelembagaan pemerintah untuk mengatasi masalah sektor informal diperkuat dengan membuat kebijakan dan program, yang mampu memobilisasi berbagai sumber daya tersebut.

4. Peranan pemerintah daerah dan pembukaan akses terhadap tata ruang. Kebanyakan sektor informal tersebar di daerah, baik perkotaan maupun perdesaan (pertanian). Instrumen terdekat dengan sektor tersebut adalah pemerintah daerah, yang dengan sengaja mesti membuat kebijakan dan program daerah untuk menyelesaikan masalah ekonomi informal ini.
5. Program langsung dalam rangka memperkuat keterampilan, keuangan, dan manajemen. Program ini bersifat pembinaan, tetapi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah terbatas. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan akses ruang publik agar ekonomi informal lebih baik kinerjanya.

Pemberdayaan (*empowerment*) secara harfiah mengandung arti memberikan atau mendapatkan kekuatan (*power*), dengan demikian pemberdayaan selalu terkait dengan memberikan kemampuan kepada golongan miskin yang biasanya tidak berdaya, untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem organisasi (Friedmann, 1992).

Upaya-upaya yang digagas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, Kartasamita mengemukakan tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi yang melatarbelakangi adalah kenyataan bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat

adalah keyakinan bahwa memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana yang menopang kehidupan baik fisik (tempat janggolan yang representatif bagi tukang becak, ketersediaan listrik, pembangunan jalan dan irigasi bagi pertanian). Selain sarana yang bersifat fisik, ketercukupan aspek sosial juga perlu dikuatkan seperti layanan kesehatan, pendidikan terjangkau dan permodalan yang mudah diakses lapisan bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Melindungi dan membela dilihat sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang diantara kelompok-kelompok sosial yang memiliki sumber daya berbeda (Kartasamita, 1996).

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang merupakan pekerja nyata dan diminati di kota-kota besar merupakan salah satu kegiatan di sektor informal. Pelaku pedagang kaki lima sebagian besar berasal dari kaum migran. Manning dan Efendi (1996) mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman di negara

berkembang pada umumnya pedagang kaki lima terdiri dari kaum migran.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no. 11 tahun 2001 pasal 1 pengertian pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan jasa di tempat umum dengan menggunakan usaha dagang.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan ekonomi di sektor informal yang cukup fenomenal keberadaannya, mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik sektor informal. Secara garis besar karakteristik pedagang kaki lima adalah tidak terorganisir dan tidak mempunyai izin, tidak memiliki tempat usaha yang permanen, tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, modal dan perputaran usaha berskala kecil dan sarana berdagang bersifat moveable serta mudah dipindahkan (Manning dan Efendi, 1996).

Karakteristik dari Pedagang Kaki Lima dijabarkan oleh Simanjutak (1989) sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengambil lokasi di kota Pekanbaru, dengan pertimbangan kota Pekanbaru merupakan kawasan yang

masyarakatnya bersifat heterogen. Pedagang kaki Lima (PKL) yang ada di kota Pekanbaru tersebar di beberapa tempat di kota Pekanbaru. Pada penelitian ini lokasi yang diamati berada disekitar jalan H.R. Subrantas kecamatan Tampan Panam.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diteliti adalah pedagang kaki lima yang didalam usahanya mempergunakan bagian jalan atau trotoar, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan untuk tempat usaha. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang karakteristik PKL yang meliputi variabel personal, historis, aktivitas, kepemilikan, komunitas, masa depan PKL dan respon dan bantuan pemerintah daerah terhadap PKL. Sedangkan kajian karakteristik profil konsumen mengkaji tentang identitas konsumen, alasan konsumen mengunjungi atau berbelanja, komoditi yang diinginkan konsumen dan motivasi konsumen berbelanja pada PKL di jalan H.R. Subrantas kecamatan Tampan Pekanbaru.

Sumber Data

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara menyebarkan kuesioner maupun wawancara langsung dengan panduan kuesioner. Pertanyaan kuesioner berkaitan dengan identifikasi karakteristik dari pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan H.R. Subrantas, konsumen yang berbelanja kepada para PKL serta pihak pemerintah kota yang diwakili oleh Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Satpol

PP dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru.

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber lain dalam bentuk sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari informasi yang telah didokumentasi oleh dinas atau instansi terkait berupa peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pkl.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yang berjualan dan konsumen yang berbelanja pada pedagang kaki lima di sepanjang jalan HR. Subrantas. Karena jumlah pedagang kaki lima dan konsumen yang banyak jumlahnya serta pedagang kaki lima dan konsumen yang mempunyai ciri-ciri yang homogen, maka penulis mengambil sampel dari pedagang kaki lima sebanyak 45 orang dan konsumen yang berbelanja kepada para PKL sebanyak 45 orang dengan menggunakan teknik *purposed sampling* yaitu sampel diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan yang erat dengan ciri-ciri populasi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk memperjelas hasil analisis dengan cara mentabulasi data dalam bentuk tabel dan mengelompokkan data dalam bentuk angka persentase dari hasil kuesioner untuk menggambarkan karakteristik dari pedagang kaki lima dan juga persepsi konsumen yang berbelanja kepada para pedagang kaki lima.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik PKL

Dari hasil pengolahan data melalui wawancara dan kuesioner tentang karakteristik PKL dapat diuraikan sebagai berikut :

Variabel Personel

PKL lebih didominasi oleh kaum pria dengan usia produktif 17 hingga 50 tahun. Pada umumnya PKL adalah kaum migran, mereka adalah pendatang dari luar daerah, berasal dari kota/kabupaten di sekitar Pekanbaru, bahkan dari provinsi lain. Pada umumnya PKL memiliki latar pendidikan rendah (tamat SD, SMP dan SMA). Lama bekerja sebagai PKL biasanya tidak terlalu lama hal ini disebabkan adanya peluang pekerjaan lain yang dianggap lebih menguntungkan mereka. Jika ada peluang yang dianggap lebih baik maka mereka akan pindah pekerjaannya. Kondisi peluang pekerjaan yang tidak menentu ini juga mendorong mereka sesekali melakukan pekerjaan sampingan..

Variabel Historis

Bekerja sebagai PKL seringkali didorong oleh keluarga sendiri atau teman. Sulitnya mencari pekerjaan merupakan alasan utama bagi mereka bekerja sebagai PKL. Kecilnya pendapatan PKL namun mereka tetap melakukannya hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi diri dan keluarganya. Mereka menyadari bekerja sebagai PKL masih dianggap memiliki masa depan yang tidak jelas, namun ini adalah pilihan mereka sebagai akibat ketidakpastian peluang pekerjaan yang lebih baik. Namun tidak sedikit dari mereka yang sukses menjadi pedagang atau pengusaha. Meskipun PKL hanyalah

usaha kecil, namun Ini membuktikan bahwa bekerja PKL adalah suatu peluang untuk belajar menjadi pedagang dan pengusaha besar.

Variabel Aktivitas

Jenis dagangan yang lebih dominan yang dipilih PKL adalah makanan dan minuman, hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam mengolah bahan mentah menjadi makanan dan minuman. Dalam hal pemilihan teknologi wadah angkutan PKL menggunakan gerobak dorong, kendaraan bermotor (roda 4, roda 3 dan roda 2) Pengguna lapak kemas biasanya juga dilakukan oleh mereka yang menggunakan kendaraan bermotor dan menurunkan barang barang disuatu tempat. Besaran Jumlah personal biasanya berhubungan dengan kapasitas barang dagangan, semakin besar barang dagangan maka akan semakin banyak jumlah personal yang dibutuhkan. Umumnya jumlah pekerja 2 - 4 orang.

Variabel Kepemilikan

PKL dalam mendistribusikan barang dan jasa dilakukan dengan modal kecil, bersumber dari modal pribadi dengan pengadaan peralatan usaha swadaya dan pengelolaannya lebih bersifat kekeluargaandan sekedar hanya untuk mempertahankan hidup.

Variabel Komunitas

Kelembagaan merupakan hal penting dalam upaya memberdayakan dan melindungi usaha PKL, namun banyak PKL yang belum mengerti pentingnya kelembagaan tersebut. Latar belakang PKL yang pada umumnya adalah pendatang dari pedesaan dan mereka bertemu serta melakukan

kegiatan usaha yang sama inilah yang mendorong mereka membentuk paguyuban kecil yang bersifat non formal. Namun sebahagian dari mereka yang sudah lama sebagai PKL telah masuk dalam keanggotaan Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang merupakan organisasi formal. Hanya sedikit dari mereka yang telah masuk dalam keanggotaan Koperasi.

Variabel Respon Pemerintah Daerah terhadap PKL.

Lokasi tempat usaha PKL yang tidak diatur dan tidak difasilitasi oleh Pemerintah Kota menyebabkan mereka dengan mudah berpindah tempat atau mendominasi tempat yang dianggap strategis. Kondisi ini menyebabkan keadaan tata letak tempat usaha semberawut dan tidak tertib. Pada umumnya PKL tidak memiliki Surat Izin Usaha, tidak memiliki Kartu Anggota PKL dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak diorganisir oleh Pemerintah Kota. PKL yang dikenakan retribusi pada umumnya dikenakan pada tempat usaha semi permanen dan jenis dagangan makanan dan minuman (kuliner) sedangkan PKL yang menggunakan moda kendaraan bermotor atau gerobak dorong tidak dikenakan retribusi tempat usaha. Namun demikian pada umumnya mereka membayar sewa tempat usaha kepada pihak pemilik lahan/ penyewa lahan.

Variabel Bantuan Terhadap PKL

Dilokasi pengamatan penelitian tidak satupun PKL yang mendapatkan bimbingan/pelatihan atas usahanya dan mendapatkan bantuan modal maupun bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah kota maupun lembaga resmi.

Karakteristik Profil Konsumen

Adapun kelompok pembeli di lokasi PKL pada umumnya mahasiswa, diikuti oleh swasta dan pegawai negeri. Ini menunjukkan kemampuan konsumen dalam memilih tempat berbelanja disebabkan oleh faktor harga murah dibandingkan belanja di pertokoan. Dan PKL mudah ditemukan pada setiap lokasi, terutama di jalur utama lingkungan perkotaan.

Dampak Positif dan Negatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Dari hasil wawancara dari masyarakat sebagai konsumen dengan adanya aktivitas PKL di jalan HR Soebrantas mereka mudah mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang murah, serta cepat mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Hal ini disebabkan karena keberadaan PKL yang cenderung berada dekat dengan aktivitas masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam arti keberadaan Pedagang Kaki Lima telah menjadi kegiatan pendukung bagi aktivitas sekitarnya. Selanjutnya mereka menginginkan PKL tetap melakukan aktivitas dengan melakukan penataan yang baik seperti tersedia tempat aktivitas PKL.

Sedangkan dari Pedagang Kaki Lima sendiri mereka menyadari bahwa keberadaan mereka tidak dapat terus menerus seperti sekarang dalam posisi dikejar-kejar oleh aparat pemerintah karena mengganggu ketertiban umum, sehingga mereka juga merasakan perlunya upaya penataan dengan catatan kepentingan mereka yaitu berdekatan dengan konsumen tetap diperhatikan. Berdasarkan dampak

yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL, keberadaan PKL sebenarnya dapat dipertahankan dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan PKL dengan menertibkan dan melakukan perencanaan yang baik terhadap pengelolaan PKL tersebut sehingga tidak mengganggu keindahan kota.

Kendala-kendala yang Dihadapi Pedagang Kaki Lima

Dari variabel-variabel karakteristik PKL dan karakteristik profil konsumen ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pedagang Kaki Lima antara lain :

1. permodalan, hal utama yang mendasar bagi pedagang kaki lima adalah mengenai kebutuhan pembiayaan usahanya yaitu kurangnya modal untuk mengembangkan usaha dan sulitnya akses ke lembaga keuangan.
2. Tempat Usaha, Dari hasil wawancara mereka mengatakan jika pemerintah tidak mengizinkan untuk berdagang di sepanjang Jalan HR. Soebrantas, mereka berharap agar pemerintah menyediakan tempat yang layak dan dekat dengan konsumen. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima menginginkan tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah, namun masih di jalan HR. Soebrantas.
3. Fasilitas Pendukung, selain sumber daya modal, pedagang kaki lima juga mengalami hambatan di dalam penyediaan peralatan dan bahan baku dalam mengembangkan usaha mereka. Umumnya usaha Pedagang Kaki Lima menggunakan peralatan

yang sederhana dan berbeda setiap jenis usaha. Dan mereka memperoleh dengan cara membeli sendiri. Pedagang Kaki Lima mengalami kesulitan untuk membeli peralatan dan bahan baku dalam skala yang besar.

Perlindungan Usaha, ketidakteraturan dalam pengelolaan usaha sektor informal menimbulkan keresahan seperti kemacetan lalu lintas, sempitnya lahan parkir dan penggusuran pedagang kaki lima. Untuk itu pemerintah kota perlu mengayomi atau melakukan perlindungan usaha dengan payung hukum tentang status dan tempat usaha. Dari hasil wawancara dengan PKL yang ada di sepanjang jalan HR Soebrantas, mereka mengatakan agar pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima dengan pengakuan terhadap pekerjaan sebagai PKL sebagai suatu profesi, karena selama ini mereka merasa cemas terhadap penggusuran akibat penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Jadi Pedagang Kaki Lima sangat mengharapkan Perlindungan usaha dari pemerintah.

Pengembangan dan pemberdayaan Sektor Informal

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan mereka. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menyangkut masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh perhatian dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pihak yang memberdayakan. Pengembangan dan

pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan dan pengelolaan dari pemerintah antara lain :

1. Membantu memfasilitasi akses permodalan.
2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana fisik.
3. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
4. Penguatan kelembagaan melalui kelompok usaha bersama.
5. Memberikan pelatihan dan Penyuluhan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor penyebab seseorang memilih pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima dipengaruhi oleh faktor seperti keadaan ekonomi keluarga dan lapangan pekerjaan.
2. Keberadaan sektor informal mempunyai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat kota Pekanbaru.
3. Permasalahan yang dihadapi pedagang sektor informal adalah masalah permodalan, tempat usaha, fasilitas pendukung dan perlindungan hukum dalam usaha.

Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait terutama pemerintah kota agar memperhatikan dan mengupayakan Pedagang Kaki Lima agar kehidupannya dapat meningkat melalui pembinaan, bimbingan dan pemberian modal serta mengeluarkan kebijakan yang mendukung Pedagang Kaki Lima serta pentingnya pembentukan asosiasi atau

paguyuban bagi pedagang kaki lima.

2. Diharapkan kepada pihak perbankan hendaknya memberikan penyuluhan tentang manfaat lembaga keuangan bagi usaha mereka dan memberikan kemudahan dalam persyaratan pemberian Modal modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Alisjahbana, 2005, *Marjinalisasi Informal Perkotaan*, Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Damsar, 1997. *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwianto, D.R. 2001. *Pendekatan Pemberdayaan Dalam Pembangunan Komunitas*. Jakarta: Unpublished Paper.
- Friedmann, John. 1979. *Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Considerations*.
- Hart, JK. 1973. *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*. *Journal of Modern African Studies*, Vol XI.
- Hidayat. 1978. *Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia*. *Journal Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)*. Vol XXVI. No. 4 Desember.
- Kasali, Rhenald, 2010. *Sektor Informal Jadi Kekuatan Ekonomi*, Jakarta: <http://yea-indonesia.com>.
- Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral. 2009, *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah ketenagakerjaan*.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Efendi,1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar*.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir. N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rake Sarasin. Yogyakarta
- Munkner, Hans H dan Thomas Walter, 2001. *Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin, dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan (Izzedin Bakhit dkk), Attacking the Roots of Poverty*, Jakarta : Yakoma-PGI.
- Mursid, M. 1997. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kotler, Philip and Gary Amstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 *Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 Tahun 2002 *Tentang Ketertiban Umum*.
- Rachbini, Didik J, 2010. *Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara*. Jakarta : <http://www.unisosdem.org.download>.
- Sari, Devita, 2003. Tesis: *Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekanbaru*.

- Stanton, William J. 1996, *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sukoharsono, E.G., 2006. *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi dan Case Study*, Di: Analisa Makro & Mikro, BPF.
- Surya, Octora Lintang, 2006. Tesis: *Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas (Studi kasus: Rumah Sakit dr. Kariadi Kota Semarang)*
- Soesilo, Nining.J. 2000. *Ekonomi, Perencanaan dan Manajemen*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, P,1995. *Peran Sosiologi dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta, Galia Indonesia.
- UU No.18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Yin, R (1994). *Case Study Reseach: Design and Methods* (2nd ed). Beverly Hills, CA: Sage Publishing.